

DEKONSTRUKSI KONSEP WARGA NEGARA IDEAL DALAM KURIKULUM MERDEKA PADA PENDIDIKAN DASAR: KAJIAN KRITIS BERBASIS TEORI KEWARGAAN

Glen Gerardus Mayela Awe¹, Maimuna Faizah Rahma Atulolon², Elisabeth Rari Basa³, Katarina Deran Kia Nimunuho⁴, Fadil Mas'ud⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana

Alamat e-mail : glenawe@gmail.com¹, rahmafaizah77@gmail.com²,
elisabethrribasa@gmail.com³, derankia24@gmail.com⁴,
fadil.masud@staf.undana.ac.id⁵

ABSTRACT

This study analyzes how the concept of the ideal citizen is constructed within the Merdeka Curriculum at the elementary education level and examines the institutional factors that influence the implementation of civic values in Civic and Pancasila Education (PPKn). The Merdeka Curriculum emphasizes the six dimensions of the Pancasila Student Profile as the foundation for shaping students' character and competencies; however, recent studies indicate that these dimensions reflect a hybrid construction that combines collectivist Pancasila values, individual 21st-century competencies, and democratic citizenship principles. Using a library research method, this study reviews official documents issued by the Ministry of Education, recent academic literature from the past decade, and theoretical frameworks of republican, liberal, and democratic citizenship. The findings reveal that the representation of the ideal citizen in the curriculum is multidimensional but potentially ambiguous when teachers lack sufficient theoretical and pedagogical understanding. Furthermore, the effectiveness of civic value implementation is strongly influenced by teacher readiness, school resource availability, and institutional culture. Schools with democratic cultures and adequate support are better able to facilitate reflective and collaborative civic learning than those with traditional instructional patterns. This study concludes that forming the ideal citizen requires not only a well-designed curriculum but also an educational ecosystem that consistently supports the internalization of Pancasila values in elementary students. These findings offer insights for policymakers, curriculum developers, and educators in strengthening civic education within the Merdeka Curriculum era.

Keywords: Merdeka Curriculum; Elementary Education; Ideal Citizen.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep warga negara ideal yang terdapat dalam Kurikulum Merdeka pada tingkat pendidikan dasar serta faktor-faktor institusional yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai kewargaan dalam pembelajaran mata pelajaran PPKn. Kurikulum Merdeka menekankan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila sebagai dasar dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa, namun berdasarkan kajian akademik, konsep tersebut menggabungkan berbagai orientasi kewargaan, seperti nilai-nilai kolektif yang berdasarkan Pancasila, kompetensi individu abad ke-21, serta prinsip kewargaan berdasarkan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis dokumen resmi dari Kemendikbudristek, literatur ilmiah selama sepuluh tahun terakhir, serta teori tentang kewargaan republik, liberal, dan demokratis. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi warga negara ideal dalam Kurikulum Merdeka bersifat campuran dan multidimensi, namun bisa menciptakan ketidakjelasan dalam penerapan jika guru tidak memiliki pemahaman teoretis yang memadai. Selain itu, keberhasilan dalam menerapkan nilai kewargaan sangat bergantung pada persiapan guru dalam mengajar, ketersediaan sumber daya sekolah, serta budaya sekolah itu sendiri. Sekolah yang memiliki budaya demokratis dan dukungan yang cukup lebih mudah menciptakan pembelajaran PPKn yang reflektif dan kolaboratif dibandingkan sekolah yang masih menggunakan pendekatan instruksional tradisional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan warga negara yang baik tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang ada, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan yang selalu mendukung penanaman nilai Pancasila kepada siswa SD. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah, pengembang kurikulum, dan para guru dalam meningkatkan pendidikan kewargaan di masa pandemi dan era Kurikulum Merdeka.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Pendidikan Dasar; Warga Negara Ideal.

A. Pendahuluan

Perubahan dalam kebijakan pendidikan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ditunjukkan dengan diperkenalkannya Kurikulum Merdeka. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tantangan dari dunia luar, kebutuhan pembelajaran yang

lebih fleksibel, serta hasil evaluasi nasional yang menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa masih rendah. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tahun 2021 dan hingga 2023–2024 sudah diterapkan oleh lebih dari 300.000 unit pendidikan, seperti yang dicatat dalam laporan resmi oleh

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024). Di tingkat pendidikan dasar, perubahan ini terasa lebih penting karena masa ini merupakan masa pembentukan karakter, nilai moral, serta pemahaman awal tentang kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka menekankan Profil Pelajar Pancasila dan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, sehingga membantu siswa dalam mengembangkan sikap berakhlak, bersikap gotong royong, berkebinekaan, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri melalui pengalaman nyata. Namun, beberapa penelitian terbaru menunjukkan masih ada ketimpangan dalam penerapan kurikulum ini di lapangan. Penelitian Syifa dan Alfirdaus (2024) menjelaskan bahwa guru SD cenderung lebih mudah mengembangkan aspek kreativitas dan pemecahan masalah dibanding mengadaptasi nilai gotong royong dan musyawarah. Kemudian, penelitian Gurion (2024) menemukan bahwa kesiapan guru dalam mengajar, terutama di mata

pelajaran PPKn, masih tidak merata sehingga tujuan pembelajaran berbasis nilai Pancasila tidak tercapai secara optimal. Selain itu, perbedaan sumber daya antar daerah, perbedaan budaya sekolah, serta pola kepemimpinan yang tidak mendukung pembelajaran reflektif menyebabkan variasi dalam kualitas penerapan Kurikulum Merdeka (Priatmoko 2014). Selain masalah dalam penerapan, peninjauan konsep terhadap dokumen Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa representasi tentang warga negara dalam dokumen ini memiliki banyak dimensi. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar utama, tetapi juga ditekankan kompetensi abad ke-21 seperti kreativitas, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Kombinasi ini menciptakan orientasi warga negara yang mencakup nilai-nilai kolektivitas Pancasila, orientasi kompetitif global yang lebih cenderung individualistik, serta prinsip demokratis yang menekankan partisipasi dan dialog. Banks (2017) menyebut tipe kombinasi ini

sebagai kewargaan hibrid yang memiliki potensi untuk berkembang, tetapi juga bisa menyebabkan ketidakjelasan jika tidak dipahami secara mendalam oleh pendidik. Hal ini terlihat dalam evaluasi awal penerapan Kurikulum Merdeka, di mana beberapa sekolah lebih mengutamakan aspek kompetensi global dibanding nilai-nilai kebangsaan kolektif, sementara sekolah lain masih mempertahankan pola tradisional yang kurang mengedepankan dialog.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini fokus pada dua isu utama yang saling terkait.

Pertama, bagaimana Kurikulum Merdeka merepresentasikan dan membentuk konsep warga negara ideal pada jenjang pendidikan dasar, serta bagaimana nilai Pancasila, kompetensi global, dan orientasi demokratis diintegrasikan dalam dokumen kurikulum. Kedua, bagaimana kesiapan guru, sumber daya sekolah, serta budaya institusi mempengaruhi proses pembelajaran PPKn, sehingga berdampak pada pembentukan nilai warga negara di sekolah

dasar. Kerangka ini diperlukan agar Kurikulum Merdeka tidak hanya dilihat sebagai teks kebijakan normatif, tetapi sebagai konstruksi ideologis yang memiliki dampak langsung terhadap praktik pendidikan warga negara. Dengan memahami hubungan antara narasi kurikulum dan kenyataan penerapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat pendidikan nilai Pancasila yang lebih kontekstual, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan warga negara abad ke-21.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis bagaimana konsep warga negara ideal dibangun dalam Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan dasar. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menganalisis teks kebijakan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terbaru tanpa perlu mengumpulkan data langsung di lapangan. Dengan

cara ini, peneliti bisa fokus pada struktur makna, nilai, dan ideologi yang terdapat dalam dokumen kurikulum (Zed 2014). Sumber data utama yang digunakan meliputi dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seperti Profil Pelajar Pancasila, Capaian Pembelajaran, serta Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi 2022–2023. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada studi akademik selama sepuluh tahun terakhir yang membahas implementasi Kurikulum Merdeka, pendidikan karakter di sekolah dasar, dan teori kewargaan kontemporer (Banks 2017; Gurion 2024; Syifa dan Alfirdaus 2024; Wahyudi 2021). Penelitian ini juga memakai teori kewargaan republik, liberal, dan demokratis sebagai alat untuk memahami arah ideologis dan tujuan pembentukan warga negara ideal dalam kurikulum (Westheimer dan Kahne 2004).

Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mereduksi data dengan mengumpulkan konsep-konsep utama seperti nilai Pancasila,

kompetensi abad ke-21, orientasi global, serta representasi kewargaan dalam dokumen kurikulum. Tahap kedua adalah penyajian data dengan mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan kerangka teori kewargaan, sehingga peneliti dapat melihat letak Kurikulum Merdeka dalam spektrum kewargaan yang mencakup orientasi republik, liberal, dan demokratis (Banks 2017). Tahap ketiga adalah interpretasi melalui pendekatan dekonstruksi untuk menemukan hubungan kekuasaan, ambiguitas nilai, serta ideologi yang tersembunyi dalam narasi kurikulum, seperti yang dilakukan dalam tradisi analisis teks kritis. Untuk memperkuat validitas interpretasi, dilakukan triangulasi dengan membandingkan dokumen kebijakan, hasil penelitian empiris, dan literatur teoretis. Hal ini memastikan bahwa pembacaan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis. Dengan metode ini, penelitian dapat memahami secara menyeluruh bagaimana Kurikulum Merdeka membentuk konsep

warga negara yang ideal, serta bagaimana konstruksi tersebut mempengaruhi penguatan pendidikan kewargaan di jenjang sekolah dasar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Representasi Konsep Warga Negara Ideal dalam Kurikulum Merdeka

Representasi warga negara yang ideal dalam Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan dasar dilihat dari penggabungan nilai-nilai Pancasila dengan kompetensi yang diperlukan di abad ke-21. Hal ini terlihat dalam Profil Pelajar Pancasila, Capaian Pembelajaran (CP) PPKn, dan Panduan Pembelajaran serta Asesmen. Profil Pelajar Pancasila menetapkan enam dimensi utama, yaitu beriman dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Enam dimensi ini menjadi kerangka untuk membentuk karakter warga negara sejak masa pendidikan dasar (Kemendikbudristek 2022). Secara konseptual, keenam dimensi ini menunjukkan gambaran tentang warga negara ideal yang

menggabungkan aspek moral, sosial, dan intelektual. Namun, jika diteliti lebih dalam, konstruksi ini tidak sepenuhnya objektif atau satu kesatuan. Sebaliknya, ia menunjukkan gabungan ideologi yang menggabungkan nilai-nilai kolektivitas bangsa, kemampuan individu, dan orientasi global yang semakin relevan dalam masyarakat modern.

Dari sudut pandang teori kewargaan, Kurikulum Merdeka juga mencakup elemen-elemen yang sesuai dengan konsep kewarganegaraan republik, terutama melalui penekanan pada gotong royong, musyawarah, kedisiplinan, serta orientasi pada kepentingan bersama.

Dalam pendidikan dasar, CP PPKn mengharuskan peserta didik mampu menunjukkan rasa peduli, menyelesaikan masalah secara damai, menjaga harmoni sosial, serta berpartisipasi aktif di lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan gagasan civic virtue, yaitu kebijakan moral sebagai fondasi kehidupan sosial (Somantri, 2021). Nilai-nilai ini telah menjadi dasar dari PPKn sebagai mata pelajaran yang membentuk karakter kebangsaan

sejak dulu. Dengan demikian, warga negara ideal dalam perspektif republik adalah individu yang peduli pada kepentingan umum, berperilaku yang baik, serta memiliki semangat patriotik terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Namun Kurikulum Merdeka juga memiliki ciri khas yang kuat dari liberal citizenship, yaitu orientasi kewargaan yang menekankan otonomi individu, kebebasan memilih, kemampuan mengambil keputusan, serta kemandirian dalam belajar. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa dimensi seperti “mandiri”, “bernalar kritis”, dan “kreatif”, serta dalam struktur kurikulum yang memberi ruang lebih luas bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran. Karakteristik ini menegaskan bahwa peserta didik adalah individu yang otonom dan bertanggung jawab atas perkembangan dirinya sendiri, yang merupakan ciri khas dari masyarakat liberal-modern (Banks 2017; Wahyudi 2021). Dalam pendidikan dasar, orientasi liberal ini terwujud melalui upaya mendorong siswa untuk membuat keputusan, bereksperimen, membuat proyek, serta mengevaluasi tindakan mereka sendiri. Sisi liberal

dari kewargaan ini cenderung lebih mudah diimplementasikan karena sesuai dengan tuntutan global terhadap kreativitas, inovasi, dan daya saing individu (Prabaningrum dan Sayekti 2023).

Selain yang bersifat republik dan liberal, Kurikulum Merdeka juga memiliki unsur kuat dari democratic citizenship, terutama melalui penekanan pada proses deliberasi, dialog, dan penyelesaian masalah sosial dalam kelompok.

Pendekatan ini sesuai dengan gagasan (Westheimer dan Kahne 2004) tentang warga negara yang terlibat aktif dalam diskusi publik, memahami ketidakadilan sosial, dan berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sekitarnya, yaitu “participatory citizen” dan “justice-oriented citizen”. Di tingkat sekolah dasar, konsep ini dijalankan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mendorong kolaborasi, musyawarah, pengamatan lingkungan, serta keterlibatan anak dalam kegiatan berbasis masalah nyata. Penelitian Syifa dan Alfirdaus (2024) serta Priatmoko (2014) menunjukkan bahwa jika P5 diterapkan secara konsisten, ia

mampu meningkatkan kemampuan partisipatif dan empati sosial peserta didik.

Meskipun begitu, penelitian dekonstruktif menunjukkan bahwa ketiga orientasi kewarganegaraan tersebut tidak hadir dalam hubungan yang sama. Kurikulum Merdeka cenderung memberikan ruang yang lebih luas untuk kompetensi individu seperti kreativitas, kemandirian, dan kemampuan adaptif karena hal-hal ini lebih mudah diukur dan dikaitkan dengan capaian di abad ke-21. Hal ini selaras dengan temuan (Gurion 2024) yang menunjukkan bahwa orientasi global dan individualistik sering kali lebih dominan dalam praktik dibandingkan nilai-nilai kolektivitas. Padahal, orientasi kolektif merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila dan dasar pembentukan warga negara yang memiliki karakter kebangsaan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ambiguitas makna: kurikulum tampak mempromosikan kewarganegaraan yang berbasis komunitas, tetapi dalam praktiknya lebih menonjolkan kompetensi individu dan orientasi performatif (Chaeratunnisa dan Pujiastuti 2023).

Oleh karena itu, konstruksi ideal warga negara dalam Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar bersifat hibrid, multidimensi, dan penuh dengan ideologi.

Kurikulum merumuskan idealitas warga negara sebagai sosok yang berakhhlak, kritis, kreatif, adaptif, dan demokratis. Namun dalam praktiknya, orientasi ini bisa ditafsirkan berbeda oleh guru dan sekolah, sehingga komponen tertentu—terutama kompetensi individu—lebih menonjol dibandingkan nilai-nilai kolektivitas yang terkandung dalam Pancasila. Konteks ini menjadikan analisis kritis terhadap kurikulum sangat penting agar pembentukan warga negara ideal tidak hanya berupa pengembangan keterampilan, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai moral, kolektif, dan kebangsaan yang menjadi ciri khas pendidikan dasar di Indonesia.

2. Pengaruh Kesiapan Guru, Sumber Daya Sekolah, dan Budaya Institusional terhadap Implementasi Nilai Kewargaan dalam PPKn di Pendidikan Dasar

Nilai kewargaan dalam Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan dasar sangat bergantung pada siapnya guru, dukungan dari sumber daya sekolah, serta budaya institusi di lingkungan sekolah (Junita, Hasanah, dan Syahrial 2024). Meskipun Kurikulum Merdeka memberi ruang untuk inovasi dan fleksibilitas, hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila dan praktik kewargaan yang demokratis sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengajar dan pemahaman mereka tentang kurikulum. Penelitian Syifa dan Alfirdaus (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD masih memandang mata pelajaran PPKn sebagai pelajaran yang hanya menghafal, bukan sebagai sarana membentuk karakter demokratis dan partisipatif. Hal ini membuat pembelajaran PPKn masih mengandalkan metode tradisional, meskipun kurikulum baru meminta pendekatan kolaboratif dan berbasis pengalaman. Di sisi lain, kurangnya pemahaman kritis guru tentang Profil Pelajar Pancasila membuat mereka lebih mudah mengajarkan dimensi seperti kreativitas atau berpikir kritis,

dibandingkan dengan nilai-nilai seperti kerja sama, musyawarah, dan solidaritas sosial.

Ketersediaan sumber daya sekolah juga memengaruhi kualitas penerapan kurikulum.

Sekolah dasar yang memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti ruang kolaborasi, akses digital, serta bahan ajar yang mendukung, umumnya lebih mampu menerapkan Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang fokus pada aktivitas sosial dan kolaboratif. Temuan Priatmoko (2014) menunjukkan bahwa sekolah dengan fasilitas dan bantuan yang memadai bisa lebih konsisten menerapkan pembelajaran berbasis proyek, terutama pada tema-tema yang mendorong partisipasi sosial seperti lingkungan dan budaya lokal. Sebaliknya, sekolah dasar di wilayah 3T yang kurang memiliki sumber daya sering kesulitan melaksanakan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, sehingga pembentukan kompetensi kewargaan tidak optimal. Laporan Asesmen Nasional (Pusat Asesmen Pendidikan 2023) juga menegaskan bahwa ketimpangan

sumber daya antar wilayah berdampak pada kualitas pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang berbasis nilai seperti PPKn.

Karimah, Santosa, dan Putra (2023) mengatakan Selain faktor guru dan sumber daya, budaya sekolah juga sangat penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung pembelajaran untuk menjadi warga negara yang baik. Sekolah yang memiliki budaya demokratis—seperti adanya komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan kepala sekolah; siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapat; serta menggunakan cara mengatasi masalah secara dialogis—lebih mampu menanamkan nilai-nilai seperti musyawarah, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian (Gurion 2024) menunjukkan bahwa budaya sekolah sangat menentukan apakah nilai-nilai Pancasila diterapkan secara nyata atau hanya menjadi kalimat di dalam kurikulum. Jika budaya sekolah bersifat otoriter atau sangat hierarkis, proses pembelajaran tentang menjadi

warga negara cenderung menekankan instruksi dan tidak memberi ruang bagi pengalaman demokratis yang autentik. Ini bertentangan dengan konsep warga negara demokratis yang menuntut siswa mengalami langsung praktik seperti diskusi, partisipasi, dan analisis nilai melalui interaksi sosial (Westheimer dan Kahne 2004).

Dari sudut pandang teori pembelajaran, konstruksi warga negara yang ideal membutuhkan keselarasan antara metode pengajaran, struktur sekolah, dan pengalaman sosial siswa.

Banks (2017) menegaskan bahwa pembelajaran tentang warga negara yang efektif harus menciptakan lingkungan yang berbasis demokrasi, bukan hanya menjelaskan konsep demokrasi. Kurikulum Merdeka secara teori sudah mengarah ke pendekatan demokratis ini, tetapi dalam praktik di sekolah dasar seringkali terhambat oleh cara pembelajaran lama yang masih menekankan kepatuhan dan kontrol. Ketidakcocokan antara visi kurikulum dan budaya sekolah menyebabkan nilai Pancasila tidak

sepenuhnya diterapkan dalam pembelajaran. Akibatnya, siswa mungkin memahami istilah seperti "gotong royong" atau "musyawarah" secara teori, tetapi tidak pernah mengalaminya secara nyata.

Dengan demikian, pembahasan masalah kedua menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membentuk warga negara ideal di tingkat dasar bukan hanya ditentukan oleh kualitas dokumen kurikulum, tetapi lebih tergantung pada kualitas guru, ketersediaan sumber daya, dan budaya sekolah.

Jika tidak ada kesiapan guru yang cukup, dukungan instansi, dan lingkungan sekolah yang demokratis, Kurikulum Merdeka berpotensi hanya menjadi kebijakan administratif yang tidak mampu merubah praktik menjadi warga negara secara mendalam. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan guru, mendistribusikan sumber daya secara merata, serta mengubah budaya sekolah menjadi hal yang sangat penting agar nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam proses pembelajaran warga negara di sekolah dasar

E. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan warga negara yang ideal dalam Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan dasar memiliki berbagai dimensi dan mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, kemampuan yang dibutuhkan di abad ke-21, serta sikap kewarganegaraan yang demokratis. Dokumen kurikulum ini menekankan karakter seperti beriman, berakhlak baik, gotong royong, dan memiliki rasa hormat terhadap keberagaman. Selain itu, peserta didik diharapkan menjadi individu yang mandiri, kreatif, bisa beradaptasi, dan kritis. Meskipun secara konsep pendekatan ini terlihat maju, analisis yang mendalam menunjukkan adanya konflik antara arah yang menekankan kelompok berdasarkan Pancasila dan arah yang bersifat pribadi berdasarkan kemampuan global. Konflik ini bisa menyebabkan kebingungan dalam memahami kurikulum ketika diterapkan di tingkat sekolah. Selain itu, penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKn sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan

sumber daya yang cukup, serta budaya sekolah itu sendiri.

Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki budaya demokratis, fasilitas yang cukup, dan guru yang memahami prinsip kurikulum bisa mengajarkan nilai Pancasila serta praktik sebagai warga negara secara lebih nyata. Sebaliknya, sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya atau masih menggunakan cara mengajar yang satu arah biasanya sulit mewujudkan tujuan kurikulum secara benar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pembentukan warga negara yang baik tidak hanya bergantung pada desain kurikulum, tetapi lebih pada kesiapan guru dalam mengajar, adanya dukungan yang merata dari institusi, serta perubahan budaya di sekolah. Untuk memastikan nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam diri siswa, diperlukan peningkatan kemampuan guru, pembentukan lingkungan belajar yang demokratis, serta kebijakan yang mendukung di semua tingkat pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Banks, J. A. 2017. *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass.
- Zed, M. 2014. *Metode penelitian* kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

artikel Jurnal:

- Chaeratunnisa, E., dan H. Pujiastuti. 2023. "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mengembangkan Profil Pelajar Pancasila pada Pembelajaran di Sekolah Dasar." *PEDAGOGY: Jurnal Pendidikan Dasar* 11(2):156–68.
- Gurion, M. 2024. "Implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar pada era Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12(1):45–59.
- Junita, E., I. Hasanah, dan S. Syahrial. 2024. "Analisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN 106162 Medan Estate." *Elementary School Journal (ESJ)* 4(1):22–33.
- Karimah, V. H., S. Santosa, dan A. Y. Putra. 2023. "Pendidikan kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka untuk membangun masyarakat madani di sekolah dasar." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8(2):145–58.

- Prabaningrum, W. F., dan L. C. Sayekti. 2023. "Implementasi

- Kurikulum Merdeka di sekolah dasar tahun ajaran 2022/2023.” *Journal of Elementary Education* 4(2):98–110.
- Priatmoko, S. 2014. “Budaya sekolah dan efektivitas Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada jenjang sekolah dasar.” *Jurnal Kependidikan Dasar Indonesia* 8(2):101–15.
- Pusat Asesmen Pendidikan. 2023. *Asesmen Nasional*. Pusat Asesmen Pendidikan. <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/>.
- Somantri, M. N. 2021. “Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan karakter bangsa.” *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 7(1):1–12.
- Syifa, N., dan A. Alfirdaus. 2024. “Tantangan implementasi pendidikan kewargaan dalam Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.” *Jurnal Civic Education Research* 5(1):12–25.
- Wahyudi, A. 2021. “Pendidikan karakter dan kompetensi abad 21 dalam konteks Kurikulum Merdeka.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia* 9(3):233–47.
- Westheimer, J., dan J. Kahne. 2004. “What kind of citizen? The politics of educating for democracy.” *American Educational Research Journal*, 41(2):237–69.
- Zed, M. 2014. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Dokumen Resmi Pemerintah / Kebijakan Pendidikan:**
- Kemendikbudristek. 2022. *Profil Pelajar Pancasila*. Kemendikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/profil-pelajar-pancasila/>.
- Kemendikbudristek. 2024. *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>.